

## Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Terkait Belum Ditahannya Firlil Bahuri

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan MAKI karena belum ditahannya Eks Ketua KPK, Firlil Bahuri, yang dituduh melakukan pemerasan Eks Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Agenda pada sidang perdana ini merupakan pembacaan permohonan praperadilan oleh MAKI.

"Pihak lawan hadir atau tidak hadir maka sidang tetap akan dilanjutkan karena hari ini penundaan yang ketiga dan mestinya lawan yang hadir sudah siap memberikan jawaban kenapa perkara mangkrak dan kenapa Firlil belum dilakukan penahanan," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pada wartawan, Rabu (27/3).

Ia berjanji MAKI akan dibubarkan jika Firlil dilakukan penahanan, atau

jika telah disidangkan pokok perkaranya oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pembubaran MAKI sebagai simbol dan hadiah karena tujuan penguatan kembali KPK telah tercapai.

Praperadilan itu diajukan lantaran polisi tak kunjung menahani Firlil hingga saat ini. Padahal, proses penyidikan kasus itu telah berjalan lebih dari 3 bulan lamanya. Dirinya pun mende sak pada jajaran Polda Metro Jaya di bawah supervisi jajaran Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menuntaskan perkara yang menjerat Firlil tersebut.

Mulai dari menahan Firlil hingga merampungkan berkas perkaranya untuk diserahkan ke kejaksaan dan bisa segera disidangkan ke pengadilan. ● han

## BNPT Ingatkan Masyarakat Waspadai Konten-konten Radikalisme di Medsos

JAKARTA (IM) - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Irfan Idris, mengajak seluruh lapisan masyarakat agar cerdas menyikapi konten radikalisme yang ada di dunia maya.

"Pemerintah terus berupaya mencerdaskan masyarakat agar cerdas menyikapi perkembangan teknologi kemajuan informasi di dunia maya," ungkap Irfan dalam siaran persnya, Rabu (27/3).

Konten radikal harus mendapatkan perhatian yang serius, karena hal ini bisa berdampak terhadap kelompok rentan, yakni perempuan, anak-anak, dan remaja.

"Konten radikal tidak boleh dibiarkan merusak dan merusak pikiran masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, remaja maupun pemuda," ujar Irfan.

Guna mengatasi penetrasi konten radikalisme yang membawa pesan kekerasan dan pemecah belah bangsa tersebut, Irfan menjelaskan, BNPT akan bersinergi dengan semua pihak untuk terus menyuarakan nilai-nilai kebangsaan. Lihat Foto Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris (Dok. BNPT RI)

"BNPT dan seluruh lapisan masyarakat terus bersinergi menyuarakan nilai-nilai yang terdapat dalam 4 konsensus bangsa," ucapnya.

Sebagai informasi, sepanjang periode Juli 2023 hingga Maret 2024, terdapat 5.731 konten terkait radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di dunia maya yang diputus akses atau di take down oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). ● mei

## Bensin Tercampur Air di SPBU Bekasi, Diduga Ada Unsur Kesengajaan

BEKASI (IM) - Polisi mencurigai ada unsur kesengajaan dalam insiden bensin tercampur air di SPBU Pertamina 34.17106, di Jalan Ir Juanda, Margahayu, Kota Bekasi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus menuturkan, polisi telah menangkap lima orang terkait kasus tersebut.

"Sementara pelaku yang diamankan ada lima orang," ujar Firdaus saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/3).

Firdaus mengatakan, dari lima orang yang ditangkap, dua orang dinyatakan terlibat dalam pencampuran bensin dengan air.

"Yang sudah positif dua, sopir sama kernet (tangki) ini yang memang mencampur bensin dengan air," katanya.

Firdaus mengatakan, sopir dan kernet mobil tangki tersebut merupakan

karyawan outsourcing. Sejauh ini, polisi belum menemukan keterlibatan pengelola SPBU dalam kasus tersebut.

"Enggak ada, hanya murni kesalahan yang disengaja oleh sopir dan kernet mobil tangki tersebut," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan kendaraan mogok massal usai mengisi bensin di SPBU Pertamina 34.17106 di Jalan Ir Juanda, Margahayu, Kota Bekasi, Senin (25/3) malam. Sejumlah pengendara terpaksa menguras tangki kendaraan mereka untuk mengetahui penyebab mesin yang tiba-tiba mati meski bensin terisi penuh.

Setelah dikuras, ditemukan dugaan penyebab puluhan kendaraan itu mogok lantaran bensin tercampur air. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Regional JBB, Eko Kristiawan mengatakan, pihaknya bakal bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan mesin kendaraan.

"Kami bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan kendaraan dan mengganti BBM kendaraan konsumen dengan Pertamina yang diakibatkan peristiwa itu," ucap Eko saat dikonfirmasi, Selasa (26/3). ● lus

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG PERSELISIHAN PILPRES 2024 PEMOHON GANJAR-MAHFUD

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3). Sidang tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan dengan penyampaian permohonan dari pemohon.

## Kubu Prabowo Tegaskan Tak Pernah Tawari Anies dan Ganjar Jadi Menteri

Kubu Prabowo-Gibran mengakui menjalin komunikasi dengan kubu 01 dan 03. Namun pihaknya tak pernah tawarkan kursi menteri kepada Anies dan Ganjar.

JAKARTA (IM) - Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kursi

menteri kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto

- Gibrak Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mengalahkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Untuk itu konfirmasi kami tidak pernah, atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Anies soal kursi di kabinet," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3).

"Bahwa kemudian berita-

berita kemudian disampaikan itu disampaikan tidak benar," ujarnya.

Dasco mengakui, kubu Prabowo-Gibran menjalin komunikasi dengan kubu 01 dan 03. Hanya saja, kata dia, belum ada pembicaraan untuk menawarkan kursi menteri ke kubu Anies dan Ganjar. "Kami sampai dengan saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak, tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet," tutur Dasco.

Dasco memastikan poster mengenai susunan kabinet pemerintah Prabowo-Gibran yang beredar baru-baru ini tidak benar. Sebab Prabowo dan Gibran saja belum membahas soal siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri. Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.

Menurut Ganjar, ia lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga

dan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing, apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar dikutip dari keterangan pers, Selasa (26/3).

Politikus PDI-P ini pun berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri kepadanya untuk duduk di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Ganjar menilai, tawaran tersebut lebih baik diberikan kepada partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo-Gibran agar lebih adil, terlebih ada banyak partai yang mendukung pasangan tersebut.

"Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk se-bebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," katanya. ● han

## Eks PIt Karutan KPK Ristanta Dihukum Sanksi Berat Wajib Minta Maaf Secara Terbuka

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan hukuman sanksi berat berupa permintaan maaf secara terbuka terhadap PIt Karutan tahun 2021 Ristanta karena terbukti melakukan pungutan liar (Pungli) di Rutan lembaga antirasuah.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Ristanta terbukti melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021. Ristanta dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan sebagai PIt Karutan KPK.

"Mengadili pertama menyatakan terperiaks Ristanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf B peraturan dewan pengawas nomor 3 tahun 2021," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Rabu (27/3).

Selain itu, Ristanta juga dijatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf secara terbuka.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiaks berupa permintaan maaf secara terbuka langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan Ristanta untuk diproses secara disiplin kepegawaian.

"Merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penajutan hukuman disiplin kepada terperiaks," jelasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 15 tersangka kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) lembaga antirasuah tersebut. Penahanan tersebut dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan dalam kapasitas mereka sebagai tersangka.

Pantauan di Gedung Juang KPK, ke-15 tahanan tersebut kompak mengenakan rompi oranye. Saat digiring menuju lokasi konferensi pers, tangan mereka terborgol.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi berat. "Dijatuhkan kepada para terperiaks adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata

Tumpak saat konferensi pers

di Kantor Dewas, Kamis 15 Februari 2024.

Tumpak menjelaskan, 12 lainnya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Alasannya, karena ketika mereka melakukan pelanggaran etik tersebut belum terbentuk Dewas KPK. "12 orang di antaranya menyerahkan ke Sekjen KPK untuk dilakukan penyelesaian selanjutnya," ujarnya.

"Karena apa? karena mereka itu melakukan perbuatan sebelum adanya Dewas KPK, sehingga dewas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak melanjutkan, para terperiaks yang dijatuhi sanksi berat didapati melanggar pasal 4 ayat 2 huruf b peraturan dewas tahun 2021 yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi.

"Jadi dalam pelaksanaan tugas nya selaku petugas tahanan dia mendapatkan suatu keuntungan pribadi berupa uang," ucapnya.

Saat ini, Dewas KPK sedang dalam tahap sidang 3 orang pegawai KPK lainnya. ● han

## Hakim Kabulkan Permohonan SYL Agar Dipindahkan ke Rutan Salemba

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan permohonan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk dipindahkan ke rumah tahanan (Rutan).

Diketahui, saat ini SYL tengah mendekam di Rutan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ingin dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat karena alasan kesehatan.

"Mengabulkan permohonan tim penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo," kata ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh saat membacakan penetapan permohonan dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Rabu (27/3).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah memperhatikan berbagai aspek untuk mengabulkan permohonan tersebut. Misalnya, usai SYL yang sudah berumur 69 tahun dan memiliki riwayat sakit paru-paru. Apalagi eks Mentan itu hanya memiliki satu paru-paru yang membutuhkan udara terbuka untuk menjaga kesehatannya.

Selain itu, SYL juga disarankan oleh dokter untuk wajib kontrol kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setiap saat.

"Bahwa setelah majelis hakim mempelajari kondisi terdakwa dan melihat secara langsung kondisi kesehatan terdakwa maka untuk menjaga kesehatan terdakwa dan demi kelancaran persidangan, permohonan terdakwa atau tim penasihat hukum terdakwa cukup beralasan untuk

dikabulkan," kata hakim.

Dengan diabulkannya permohonan tersebut, maka majelis hakim memberi izin untuk memindahkan tempat penahanan Syahrul Yasin Limpo dari cabang Rutan KPK Kelas I Jakarta Timur ke Rutan kelas I Salemba Jakarta Pusat.

"Memerintahkan penuntutan umum KPK untuk melaksanakan penetapan ini segera setelah penetapan ini dibacakan," kata hakim Rianto.

Dalam sidang sebelumnya, SYL mengungkapkan kondisi udaranya di Rutan KPK yang membuatnya sulit bernapas. Pasalnya, ventilasi di Rutan Gedung Merah Putih dinilai tidak cukup memberikan udara yang baik.

"Saya agak kesulitan bernapas terkadang karena sangat tidak ada ventilasi langsung, kami mendapatkan dari fan yang ada, atau kipas angin," kata SYL. Eks Mentan itu lantas meminta agar pemindahan Rutan dapat dipertimbangkan. Terlebih, permohonan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan kesehatan.

"Maaf Yang Mulia, sekadar untuk kepentingan kesehatan, saya pernah dua bulan lebih bengkok seluruh kaki saya karena fungsi fungsi organ saya terganggu dgn oksigen yg ada, sekadar itu. Tapi kalau ini tidak berkenan, kami siap melakukan apa saja sesuai perintah," kata SYL.

Berdasarkan surat dakuwaan, SYL disebut menerima uang Rp 44,5 miliar dari hasil memeras di Kementan. SYL juga tengah dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini masih bergulir di tahap penyidikan oleh KPK. ● han



MENKO POLHUKAM SILATURAHMI DI TEBUIRENG JOMBANG

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kdua kiri) didampingi Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (ketiga kiri) berziarah ke makam Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (27/3). Menko Polhukam menggelar silaturahmi dengan pimpinan dan pengurus Pesantren Tebuireng serta menziarahi makam Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

**PENGUMUMAN**  
Diumumkan bahwa PT. TERTAJAYA SEKAWAN MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan tanggal 01 Maret 2024, berdasarkan akta Berita Acara tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 23 yang dibuat dihadapan MELINDA SIDARTA, SH.  
Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Likwidator di kantor Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pengumuman ini.  
Jakarta, 28 Maret 2024  
Tim Likuidasi  
PT. TERTAJAYA SEKAWAN MANDIRI

HUNTER DOUGLAS INDONESIA  
Standard Factory Building  
Jl. Jatiwarna III, Blok No. 11E  
Cikarang Industrial Estate  
Bekasi - Indonesia  
T: 62-21-8994-022  
F: 62-21-8994-740  
hdi@hunterdouglas.co.id  
www.hunterdouglas.co.id

**PENGUMUMAN**  
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, PT. Hunter Douglas Indonesia perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, pemegang NWP 01.070.943.4-055.000, berkedudukan di Standard Factory Blok J No. 11 E. Cikarang Industrial Estate Bekasi, No. Telepon: (021) 29670001 dengan ini mengumumkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2024 sebesar IDR 86.848.350,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Perak Rupiah), jumlah dimana telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan Perusahaan.  
Rincian nama customer dan nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah sebagai berikut:  
(1) PT. Suryametall Nusantara senilai IDR 86.848.350,00  
Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tambahan atas penghapusan piutang dimaksud dapat menghubungi kami pada alamat tersebut di atas yang dialamatkan kepada bagian keuangan.  
Jakarta, 22 Maret 2024  
PT. HUNTER DOUGLAS INDONESIA  
Alfonsius Erwin Setiadi  
Direktur PT. Hunter Douglas Indonesia